

INTISARI

ANALISIS PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah Pemerintah Daerah dalam mengusahakan sumber-sumber penerimaan yang terbatas yang harus diusahakan oleh Daerah. Penerimaan Asli Daerah sebagai penerimaan yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber dana dari daerahnya sendiri, kenyataannya masih kecil peranannya di dalam menopang keuangan daerah. Dalam pada itu umumnya Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia masih sangat tergantung pada Penerimaan yang Berasal dari Pemerintah Pusat.

Daerah Tingkat I Jawa Timur juga mengalami kondisi yang sama dengan Daerah Tingkat I lainnya di Indonesia, dimana Penerimaan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan pusat. Menurut data pada Pelita IV penerimaan Pemerintah Daerah pada kenyataannya masih sangat tergantung pada Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat, sekitar 80% Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan Penerimaan Asli Daerah hanya menyumbang sekitar 18% dari total penerimaan daerah.

Mengingat besarnya dominasi Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah pusat ini terhadap penerimaan daerah maka Pemerintah perlu memperhatikan kriteria pengalokasiannya. Permasalahannya adalah, seberapa besar ketergantungan Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat dalam menopang keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat sulit ditelusuri dengan keterbatasan data yang ada. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan mencoba mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan dibatasi pada beberapa faktor yang dianggap mempunyai hubungan dengan Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat. Melalui alat bantu ekonometrik maka dapat dibuktikan bahwa Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I Jawa Timur dipengaruhi oleh jumlah pegawai daerah, jumlah penduduk murid Sekolah Dasar, usaha pajak daerah dan PDRB/kapita.